



TRANSISI ENERGI TERBARUKAN DI UNI EROPA MELALUI *EUROPEAN GREEN DEAL*

¹Kania Amalia Putri & ²Enny Fathurachmi

¹ Program Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Mulawarman, Samarinda
kaniaamaliaputri12@gmail.com

² Program Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Mulawarman, Samarinda
Efathurachmi@gmail.com

Received: Mei 2026; Revised: Mei 2026; Accepted: Mei 2026; Published: 30 Mei 2026; Available online: Mei 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan energi terbarukan di Uni Eropa melalui program *European Green Deal* pada periode 2019-2024. Inisiatif strategis yang diluncurkan oleh Komisi Eropa di bawah kepemimpinan Ursula von der Leyen ini dirancang untuk mendorong transformasi menuju netralitas iklim pada tahun 2050. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan teknik studi literatur terhadap dokumen kebijakan, laporan resmi, serta publikasi ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan energi terbarukan melalui *European Green Deal* telah memperlihatkan kemajuan, terutama dalam penguatan kerangka regulasi dan peningkatan komitmen negara anggota. Meskipun demikian, capaian aktual masih belum sepenuhnya memenuhi target ambisius yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh tantangan struktural, perbedaan kapasitas antarnegara anggota, serta fakta bahwa program masih berada dalam tahap konsolidasi dan pelaksanaan awal.

Key Word: *European Green Deal*, Kebijakan Energi Terbarukan, Uni Eropa

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of renewable energy policy in the European Union through the European Green Deal during the 2019-2024 period. This strategic initiative, launched by the European Commission under the leadership of Ursula von der Leyen, was designed to drive the transformation toward climate neutrality by 2050. The research employs an interpretative qualitative approach using a literature review of policy documents, official reports, and relevant academic publications. The findings indicate that the implementation of renewable energy policy through the European Green Deal has shown progress, particularly in strengthening the regulatory framework and increasing the commitment of member states. Nevertheless, actual achievements have not yet fully met the

ambitious targets set. This condition is influenced by structural challenges, differences in capacity among member states, and the fact that the program remains in a phase of consolidation and early implementation.

Key Word : *European Green Deal, Renewable Energy Policy, European Union*

PENDAHULUAN

Perubahan iklim global merupakan konsekuensi dari interaksi kompleks antara aktivitas manusia dan faktor alamiah. Namun demikian, peningkatan emisi gas rumah kaca akibat pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, serta aktivitas industri dan pertanian modern menjadi faktor dominan yang mempercepat pemanasan global. Kenaikan suhu bumi telah memicu perubahan pola cuaca yang semakin ekstrem, meningkatnya frekuensi bencana alam, serta ancaman serius terhadap keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Dalam beberapa dekade terakhir, laju pemanasan global tercatat semakin cepat dibandingkan awal abad ke-20, dengan tahun 2023 menjadi salah satu periode terpanas sejak pencatatan suhu global dimulai pada 1850 (Climate Gov, 2024).

Emisi gas rumah kaca menjadi isu strategis dalam politik lingkungan internasional. Amerika Serikat, misalnya, tercatat sebagai penyumbang emisi terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok pada 2019 (Macrotrends, 2025). Sementara itu, Uni Eropa juga menghadapi tantangan pengendalian emisi meskipun dikenal memiliki regulasi lingkungan yang relatif ketat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa komitmen normatif saja tidak cukup tanpa implementasi kebijakan yang efektif dan konsisten.

Sebagai respons atas urgensi tersebut, komunitas internasional mengadopsi *Paris Agreement* pada 12 Desember 2015 melalui COP ke-21 di Paris (United Nations Climate Change, 2025). Kesepakatan ini merupakan kelanjutan dari kerangka kerja UNFCCC 1992 dan menargetkan pembatasan kenaikan suhu global hingga 1,5°C, dengan 2°C sebagai batas maksimum yang masih dapat ditoleransi. Hingga kini, 196 negara telah menjadi pihak dalam perjanjian tersebut (United Nations Climate Change, 2025). Uni Eropa dan negara-negara anggotanya meratifikasi *Paris Agreement* sebagai bentuk komitmen terhadap pengurangan emisi dan transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Dalam konteks regional, Uni Eropa merumuskan *European Green Deal* sebagai strategi komprehensif untuk merealisasikan target *Paris Agreement*. Pada 11 Desember 2019, Komisi Eropa secara resmi mengusulkan *European Green Deal* sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi kawasan (Siddi, 2020). Program ini

dikoordinasikan terutama oleh *Directorate General for Climate Action* (DG CLIMA) dan *Directorate General for Environment* (DG ENV), serta melibatkan berbagai sektor seperti energi, transportasi, industri, dan pertanian.

European Green Deal dirancang untuk menjadikan Uni Eropa sebagai kawasan pertama yang mencapai netralitas iklim pada 2050. Kebijakan ini mencakup berbagai inisiatif, seperti *From Farm to Fork*, *Renovating Buildings*, serta *Clean Energy for All Europeans*, yang berorientasi pada pengurangan emisi, peningkatan efisiensi energi, dan percepatan transisi energi bersih (European Commission, 2025). Selain itu, revisi standar kualitas udara melalui *EU Ambient Air Quality Directive* memperketat ambang batas polutan seperti PM2.5 dan NO₂ sebagai bagian dari perlindungan kesehatan publik (European Union, 2025).

Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini tidak lepas dari tantangan struktural. Ketergantungan sebagian negara anggota terhadap bahan bakar fosil masih tinggi, terutama pada sektor industri dan transportasi. Transisi menuju energi terbarukan seperti tenaga angin dan surya membutuhkan investasi besar, kesiapan teknologi penyimpanan energi, serta modernisasi jaringan listrik. Selain itu, terdapat kesenjangan kapasitas ekonomi

dan regulasi antarnegara anggota yang memengaruhi kecepatan implementasi kebijakan energi terbarukan. Dengan demikian, *European Green Deal* tidak hanya merupakan instrumen kebijakan lingkungan, tetapi juga strategi transformasi ekonomi jangka panjang. Keberhasilannya sangat bergantung pada koordinasi lintas negara anggota, konsistensi regulasi, dukungan pendanaan, serta inovasi teknologi yang mampu menjawab tantangan transisi energi di kawasan Eropa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan secara komprehensif bagaimana program *European Green Deal* diimplementasikan sebagai instrumen utama Uni Eropa dalam mendorong transisi menuju energi berkelanjutan. Penelitian ini berupaya menguraikan arah kebijakan, mekanisme pelaksanaan, serta strategi yang ditempuh dalam mempercepat pemanfaatan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil di kawasan Eropa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran *European Green Deal* sebagai kerangka kebijakan transformatif dalam mewujudkan sistem energi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan selaras dengan target netralitas iklim Uni Eropa.

METODE

Teori yang digunakan dalam penelitian mengenai upaya Uni Eropa melalui program *European Green Deal* dalam implementasi energi terbarukan adalah teori *Environmentalism*.

Environmentalism merupakan pendekatan dalam studi lingkungan dan politik yang menelaah bagaimana lembaga, norma, serta kebijakan memengaruhi upaya perlindungan lingkungan (Harris, 2014).

Environmentalism merujuk pada kepedulian terhadap lingkungan serta upaya untuk mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap alam. Matthew Patterson dalam "*Theories of International Relations*" menjelaskan bahwa *Environmentalism* menerima kerangka politik, sosial, dan ekonomi yang telah ada, namun berupaya memperbaiki permasalahan lingkungan melalui kebijakan dalam sistem tersebut.

Fokus utama *Environmentalism* mencakup berbagai isu kerusakan lingkungan seperti perubahan iklim, pencemaran udara dan air, penipisan sumber daya alam, serta kepunahan spesies (Lestari, 2016). Dalam konteks ini, *Environmentalism* mendorong lahirnya kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan serta perlindungan terhadap ekosistem.

Selain *Environmentalism*, penelitian ini juga menggunakan teori implementasi kebijakan untuk

menganalisis pelaksanaan program *European Green Deal* dalam mendorong energi terbarukan di Uni Eropa. Menurut Edward III, implementasi kebijakan merupakan tahap yang menghubungkan penetapan kebijakan dengan dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Implementasi mencakup tindakan pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan serta dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.

Van Meter dan Van Horn mengemukakan beberapa indikator yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Pertama, kejelasan standar dan tujuan kebijakan yang ingin dicapai. Kedua, ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, finansial, maupun teknologi. Ketiga, komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana. Keempat, karakteristik organisasi pelaksana yang mencakup struktur dan kapasitas kelembagaan. Kelima, sikap atau komitmen para pelaksana kebijakan. Keenam, kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang dapat memengaruhi jalannya implementasi kebijakan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam langkah-langkah konkret yang ditempuh Uni Eropa dalam mendorong transisi menuju energi

terbarukan melalui program *European Green Deal*. Fokus penelitian diarahkan pada pemetaan kebijakan, instrumen regulasi, serta strategi yang dirumuskan dalam kerangka *European Green Deal*, khususnya yang berkaitan dengan percepatan pengembangan energi bersih dan pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini berupaya mengidentifikasi bentuk implementasi kebijakan sekaligus menelaah tantangan dan capaian yang muncul dalam proses pelaksanaannya.

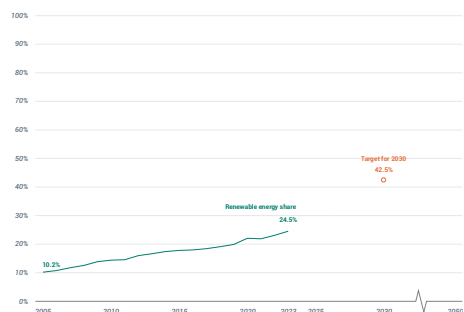
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *library research*, dengan menelaah dan mengkaji berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, laporan resmi lembaga Uni Eropa, dokumen kebijakan, penelitian terdahulu, serta artikel yang relevan baik daring maupun luring. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh landasan konseptual dan empiris yang kuat mengenai latar belakang kebijakan, tujuan strategis, serta dinamika implementasinya di tingkat regional.

PEMBAHASAN

Sejak diluncurkan pada Desember 2019, *European Green Deal* menjadi kerangka strategis utama Uni Eropa untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2050 (Consilium Europe, 2025).

Kebijakan ini tidak hanya menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca, tetapi juga mendorong transformasi sistem energi secara menyeluruh, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi energi (S&P, 2020). Dalam konteks ini, energi terbarukan ditempatkan sebagai pilar utama transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan.

European Green Deal dirancang tidak hanya sebagai kebijakan lingkungan, tetapi sebagai strategi pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan sektor energi, industri, transportasi, pertanian, hingga bangunan. Reformasi regulasi energi diperkuat melalui pembaruan *Renewable Energy Directive* yang menetapkan target minimal 42,5% energi terbarukan dalam bauran energi Uni Eropa pada tahun 2030, dengan kemungkinan peningkatan hingga 45% (European Parliament, 2025). Target ini menunjukkan peningkatan ambisi dibandingkan kebijakan sebelumnya dan menjadi dasar percepatan investasi energi bersih di seluruh negara anggota.



Data *European Environment Agency* (2025) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 pangsa energi terbarukan dalam konsumsi akhir energi bruto Uni Eropa mencapai 24,5%, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian ini menegaskan adanya kemajuan konkret, meskipun laju peningkatannya masih perlu dipercepat agar selaras dengan target 2030.

Sebagai bagian dari implementasi kebijakan dalam kerangka *European Green Deal*, strategi *From Farm to Fork* hadir sebagai upaya transformasi sistem pangan Uni Eropa menuju model yang lebih berkelanjutan, sehat, dan ramah lingkungan. *From Farm to Fork* diperkenalkan pada 20 Mei 2020 (European Union, 2021). Strategi ini menitikberatkan pada reformasi sistem pangan agar lebih berkelanjutan, sehat, dan berkeadilan. Target kebijakan hingga 2030 meliputi pengurangan risiko dan penggunaan pestisida sebesar 50%, penurunan penggunaan pupuk kimia minimal 20%, serta peningkatan pertanian organik hingga 25% dari total lahan pertanian Uni Eropa (European Union, 2021).

Pelaksanaannya terintegrasi dengan *Common Agricultural Policy* (CAP) dan *Common Fisheries Policy* (CFP), serta didukung melalui skema *eco-schemes* pada periode anggaran 2021-2027 (FAO, 2020). Selain itu, sistem pemantauan diperkuat melalui transformasi *Farm Accountancy Data Network*

(FADN) menjadi *Farm Sustainability Data Network* (FSDN) untuk memasukkan indikator sosial dan lingkungan (European Commission, 2022). Meskipun arah kebijakan telah jelas, implementasi di lapangan masih menghadapi resistensi dan perbedaan kesiapan antarnegara anggota, khususnya dalam perubahan praktik pertanian konvensional menuju sistem yang lebih ramah lingkungan.

Dalam sektor bangunan, Uni Eropa meluncurkan inisiatif *Renovation Buildings* sebagai respons terhadap tingginya konsumsi energi dan emisi karbon dari sektor properti. Sektor bangunan menjadi fokus penting karena menyumbang hampir 40% konsumsi energi Uni Eropa (European Commission, 2025). Revisi *Energy Performance of Buildings Directive* (EPBD) mewajibkan renovasi terhadap 16% bangunan dengan performa energi terendah pada 2030 dan 26% pada 2033 (European Council, 2023). Setiap negara anggota diwajibkan menyusun *National Building Renovation Plans* sebagai panduan implementasi nasional. Dari sisi pembiayaan, investasi tambahan sekitar €177 miliar per tahun dialokasikan untuk mendukung transisi energi bersih melalui berbagai instrumen, termasuk *NextGenerationEU* (European Commission, 2016). Namun, laporan *European Court of Auditors* (2024) mencatat adanya kesenjangan pendanaan dan

kapasitas administratif di beberapa negara anggota, yang berpotensi memperlambat pelaksanaan renovasi skala besar.

Sementara itu, *Clean Energy for All Europeans* menjadi pilar utama dalam reformasi sistem energi Uni Eropa. *Clean Energy for All Europeans* diperkenalkan pada 30 November 2016 dan secara resmi diadopsi pada 22 Mei 2019 (European Commission, 2017). Paket ini bertujuan membangun sistem energi yang berkelanjutan, kompetitif, dan terintegrasi di seluruh kawasan (ACER, 2025).

Target awalnya mencakup minimal 32% energi terbarukan dan peningkatan efisiensi energi 32,5% pada 2030, yang kemudian diperkuat dengan target pengurangan emisi sebesar 55% melalui revisi kebijakan iklim (Florence School of Regulation, 2020). Kebijakan ini juga memperkuat posisi konsumen sebagai prosumer, yaitu individu atau komunitas yang dapat memproduksi dan menjual energi terbarukan (European Commission, 2018).

Implementasinya menunjukkan kemajuan dalam dekarbonisasi sektor listrik dan integrasi pasar energi. Namun, negara seperti Kroasia, Portugal, Slovakia, dan Yunani masih menghadapi kendala pembiayaan serta kapasitas administrasi (European Court of Auditors, 2024). Tantangan lain meliputi

keterbatasan lahan untuk proyek energi terbarukan serta proses perizinan yang kompleks (PVTECH, 2024).

Implementasi *European Green Deal* tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan politik. Polandia, misalnya, menyatakan keberatan terhadap target netralitas karbon 2050 karena ketergantungannya pada batu bara dan menuntut dukungan finansial tambahan melalui *Just Transition Fund* (European Union, 2022). Hal ini mencerminkan adanya perbedaan kepentingan dan kapasitas ekonomi antarnegara anggota.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan energi terbarukan di Uni Eropa melalui program *European Green Deal* periode 2019-2024 menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun belum sepenuhnya mencapai target ambisius yang telah ditetapkan untuk 2030. Secara normatif, Uni Eropa telah merumuskan arah kebijakan yang jelas, terukur, dan terintegrasi melalui tiga pilar utama yaitu *From Farm to Fork*, *Renovation Buildings*, dan *Clean Energy for All Europeans*. Dari ketiga pilar tersebut, capaian implementasi menunjukkan hasil yang beragam. Secara keseluruhan, *European Green Deal* berhasil memperkuat fondasi

transisi energi bersih dan mengarahkan kebijakan iklim Uni Eropa menjadi lebih konsisten dan terstruktur. Namun, percepatan implementasi, penguatan infrastruktur, serta komitmen berkelanjutan dari negara anggota tetap menjadi prasyarat utama untuk mencapai target jangka panjang yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.

Harris, P. G. (Ed.). (2014). *Routledge handbook of global environment politics*. New York, NY: Routledge.

Paterson, M. (2005). *Theories of international relations*. New York, NY: Palgrave Macmillan.

Jurnal:

Lestari, Y. S. (2016). Environmentalism dan green politics: Pembahasan teoretis. *Community*, 1(2), 188–200.

Siddi, M. (2020). The European Green Deal: Assessing its current state and future implementation. FIIA Working Paper, 114, 4–12.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy

implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.

Website:

<https://www.acer.europa.eu/electricity/about-electricity/clean-energy-package> . Diakses pada 16 Oktober 2025

<https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-temperature> . Diakses pada 16 Juli 2024

<https://www.consilium.europa.eu/en/policies/climate-change/> . Diakses pada 5 Juli 2025

<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/12/07/fit-for-55-council-and-parliament-reach-deal-on-proposal-to-revise-energy-performance-of-buildings-directive/> . Diakses pada 16 Oktober 2025

https://commission.europa.eu/stategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/energy-and-green-deal_en . Diakses pada 10 Juli 2025

https://climate.ec.europa.eu/eu-action/european-climate-law_en . Diakses pada 20 September 2025

<https://www.eca.europa.eu/en/publications?ref=sr-2024-14> .

- Diakses pada 21 November 2025
- https://www.europarl.europa.eu/thinktank/ga/document/EPRS_BRI%282022%29729366 . Diakses pada 2 Desember 2025
- <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/farm-to-fork-strategy-for-a-fair-healthy-and-environmentally-friendly-food-system.html> . Diakses pada 17 Oktober 2025
- <https://www.fao.org/agroecology/database/detail/en/c/1277002/> . Diakses pada 17 Oktober 2025
- <https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/ranking/ghg-greenhouse-gas-emissions> . Diakses pada 2 Desember 2025
- <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/246970b8-1dd6-11ed-8fa0-01aa75ed71a1/language-en> . Diakses pada 8 Juli 2025
- <https://www.spglobal.com/en/research-insights/market-insights/what-is-energy-transition> . Diakses pada 16 Januari 2026
- <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement> . Diakses pada 13 April 2025
- <https://www.pv-tech.org/2-2-of-land-needed-for-europes-2040-clean-energy-targets/> . Diakses pada 2 Desember 2025